



LKIP 2018



Dinas
Perdagangan
dan Perindustrian
Kota Bandung



Jl. Nuansa Mas Raya No. 2 Cipamokolan Bandung



(022) 87303993



https://twitter.com/disdagin_bdg
<https://www.facebook.com/disdagin>
https://www.instagram.com/disdagin_bdg

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang mencakup Akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan Tujuan dan Sasaran strategis Tahun 2013-2018.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung disusun berdasarkan pada PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Penyusunan LKIP 2018 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, serta Akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bandung, Januari 2019

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA BANDUNG


ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19711102 199603 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Wali Kota Bandung dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan, capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Analisis dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini digunakan untuk membuktikan sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kepala Dinas yang telah ditetapkan pada Tahun 2018.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan tersebut setiap sasaran menunjukan beberapa tantangan dan perbaikan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung kedepan, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik, sehubungan dengan hal tersebut pentingnya koordinasi dan sinergi antara berbagai unsur Instansi terkait ataupun mitra-mitra kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Sebagai langkah nyata dari perbaikan berkelanjutan tersebut, pada Tahun 2018 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung akan mempersiapkan SDM dan infrastruktur untuk mendorong pelayanan publik prima yang dicanangkan oleh Walikota Bandung untuk mendukung *Zero Complain Governance* dengan memperhatikan kondisi perkembangan Perdagangan dan Industri di Kota Bandung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang mencakup Akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan Tujuan dan Sasaran strategis Tahun 2013-2018.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung disusun berdasarkan pada PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Penyusunan LKIP 2018 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, serta Akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bandung, Januari 2019

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA BANDUNG

ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, S.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19711102 199603 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian	I-2
C. Tugas dan Fungsi	I-3
D. Isu Strategis	I-5
E. Landasan Hukum	I-6
F. Sistematika	I-7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-8
1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	II-8
A. Rencana Strategis	II-8
1. Visi	II-9
2. Misi	II-10
3. Tujuan dan Sasaran	II-10
B. Indikator Kinerja Utama	II-12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	II-13
1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu	II-14
A. Rencana Strategis Hasil Reviu	II-14
B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	II-15
C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu	II-18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-19
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	III-19
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	III-21
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ...	
D. Akuntabilitas Keuangan	III-23
	III-43
BAB IV PENUTUP	IV-44



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.



Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berdiri sejak Tahun 2017, sebagaimana telah di terbitkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, yang pada SOTK sebelumnya bernama Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung beralamat di Jalan Nuansa Mas Raya No. 2 Telp. & Fax (022) 87303993 Kode Pos 40292 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung, ex Kantor Unit Pelayanan Pajak Bandung Timur.



C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan lingkup urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan lingkup urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup bidang perdagangan dan bidang perindustrian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas, dipimpin oleh Eric Mohamad Atthauriq, SH. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :



- A. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
- B. Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Pelatihan dan Pembinaan Perdagangan;
 - 2. Kepala Seksi Sarana dan Pembiayaan Perdagangan; dan
 - 3. Kepala Seksi Pengembangan dan Promosi Perdagangan.
- C. Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengembangan E-Commerce, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Distribusi Perdagangan;
 - 2. Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan
 - 3. Kepala Seksi Pengembangan E-Commerce.
- D. Kepala Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Ekspor Impor;
 - 2. Kepala Seksi Pengembangan Ekspor; dan
 - 3. Kepala Seksi Hubungan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri.
- E. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan Sentra Industri;
 - 2. Kepala Seksi Pengembangan, Inovasi dan Teknologi; dan
 - 3. Kepala Seksi Standarisasi Industri.



F. Kepala Bidang Sumber Daya dan Promosi Industri, membawahkan :

1. Kepala Seksi Sumber Daya dan Investasi Industri;
2. Kepala Seksi Sistem Produksi dan Pembiayaan; dan
3. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Industri.

G. Kepala UPT Balai Industri dan Promosi, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

H. Kepala UPT Metrologi Legal, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Isu Strategis

1. Masih rendahnya daya saing produk Perdagangan dan Perindustrian;
2. Masih Rendahnya SDM Perdagangan dan Perindustrian;
3. Kurang optimalnya pengembangan Industri Kreatif Kota Bandung;
4. Rendahnya Kualitas produk ekspor dan kurangnya informasi mengenai prosedur ekspor;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen dan terjadinya gejolak harga serta masih beredarnya barang-barang tiruan dan ilegal di Kota Bandung; dan
6. Belum optimalnya kualitas laporan keuangan dan AKIP.



E. Landasan Hukum

LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;



10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Revisi Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Revisi Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 518/Kep. 120.1-Disdagin/II/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota Bandung terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Revisi Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.



Revisi Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018.

Penyusunan Revisi Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Revisi Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Revisi Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera.



Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2014-2018 adalah “Terwujudnya perdagangan dan perindustrian Kota Bandung yang berdaya saing tinggi guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta berbasis teknologi”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya saing perdagangan dalam dan luar negeri serta pelayanan kemetrolgian yang berbasis teknologi;
- b. Meningkatkan daya saing industri yang berbasis teknologi;
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM).

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2014-2018 sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Perdagangan dalam dan luar negeri yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing	Berkembangnya Nilai Ekspor	Nilai ekspor Kota Bandung	-	-	-	457	462
		Terwujudnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	-	-	-	15	15
			Meningkatnya kualitas SDM pelaku perdagangan dalam negeri	-	-	-	300	300
2	Terwujudnya pelayanan prima metrologi legal	Meningkatnya pelayanan Metrologi Legal	Tingkat alat UTTP yang di tera/tera ulang	-	-	-	10	18
3	Terwujudnya industri yang berdaya saing	Meningkatnya mutu produk industri	Jumlah Produk industri yang memiliki Sertifikat	-	-	-	600	600
		Meningkatnya inovasi teknologi industri	Lapangan pekerjaan baru	-	-	-	350	500
			Jumlah IKM yang dipromosikan	-	-	-	200	200
		Meningkatnya SDM Industri	Persentase industri kecil yang memiliki SDM berkualitas	-	-	-	89,50	97.83
4	Terwujudnya pelayanan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				80	81

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Nomor 518/Kep.56/DISDAGIN/I/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Berkembangnya Nilai Ekspor	Nilai ekspor Kota Bandung	Juta US\$	Berdasarkan Permendag Nomor 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang ketentuan dan tatacara penerbitan SKA	Jumlah penerbitan SKA Kota Bandung	Nilai ekspor dilihat dari realisasi SKA Kota Bandung. Satuan nilai yaitu US\$, berdasarkan nilai yang tercantum pada pemberitahuan ekspor barang yang dikeluarkan oleh Bea Cukai
2	Meningkatnya pelayanan Metrologi Legal	Tingkat alat UTTP yang di tera/tera ulang	Jenis UTTP	Untuk melindungi kepentingan umum dan konsumen	Sesuai UTTP yang diuji (tera/tera ulang)	Masa uji UTTP cap tanda sah sudah habis



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
3	Meningkatnya inovasi teknologi industri	Lapangan pekerjaan baru	Orang	Pelatihan pendampingan bagi warga masyarakat	Jumlah warga masyarakat sebelum pelatihan pendampingan dan setelah pelatihan pendampingan	Warga masyarakat yang belum memiliki pekerjaan/perlu peningkatan kompetensi

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2014-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Berkembangnya Nilai Ekspor	Nilai ekspor Kota Bandung	462
2	Meningkatnya pelayanan Metrologi Legal	Tingkat alat UTTP yang di tera/tera ulang	18
3	Meningkatnya inovasi teknologi industri	Lapangan pekerjaan baru	500
		Jumlah IKM yang dipromosikan	200

1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tahun 2018. Berdasarkan hasil reuiu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reuiu
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Terwujudnya Perdagangan dalam dan luar negeri yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing	Berkembangnya Nilai Ekspor	Nilai ekspor Kota Bandung	Juta US\$	-	-	-	457	462
		Terwujudnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	%	-	-	-	15	15
			Meningkatnya kualitas SDM pelaku perdagangan dalam negeri	Pelaku usaha	-	-	-	300	300
2	Terwujudnya pelayanan prima metrologi legal	Meningkatnya pelayanan Metrologi Legal	Tingkat alat UTTP yang di tera/tera ulang	Jenis UTTP	-	-	-	10	18
3	Terwujudnya industri yang berdaya saing	Meningkatnya mutu produk industri	Jumlah Produk industri yang memiliki Sertifikat	IKM	-	-	-	600	600
		Meningkatnya inovasi teknologi industri	Lapangan pekerjaan baru	Orang	-	-	-	350	500
			Jumlah IKM yang dipromosikan	IKM	-	-	-	200	200
		Meningkatnya SDM Industri	Persentase industri kecil yang memiliki SDM berkualitas	%	-	-	-	89,50	97.83
4	Terwujudnya pelayanan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai				80	81

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reuiu

Bersamaan dengan reuiu rencana strategis juga dilakukan reuiu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian hasil reuiu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Berkembangnya Nilai Ekspor	Nilai ekspor Kota Bandung	Juta US\$	Berdasarkan Permendag Nomor 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang ketentuan dan tatacara penerbitan SKA	Jumlah penerbitan SKA Kota Bandung		Nilai ekspor dilihat dari realisasi SKA Kota Bandung. Satuan nilai yaitu US\$, berdasarkan nilai yang tercantum pada pemberitahuan ekspor barang yang dikeluarkan oleh Bea Cukai
2	Terwujudnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	%	Kebutuhan harga bahan pokok merupakan kebutuhan primer yang harus terkendali	Harga barang kebutuhan pokok normal berbanding harga saat terjadi peristiwa Ekonomi di Kota Bandung		Monitoring dilaksanakan pada : 1. Pasar Modern 2. Pasar Tradisional
		Meningkatnya kualitas SDM pelaku perdagangan dalam negeri	Pelaku usaha				
3	Meningkatnya pelayanan Metrologi Legal	Tingkat alat UTTP yang di tera/tera ulang	Jenis UTTP	Untuk melindungi kepentingan umum dan konsumen	Sesuai UTTP yang diuji (tera/tera ulang)		Masa uji UTTP cap tanda sah sudah habis
4	Meningkatnya mutu produk industri	Jumlah Produk industri yang memiliki Sertifikat	IKM	Sertifikat halal merupakan ukuran mutu kehalalan suatu produk dan sertifikat kepemilikan merk (HKI) menjadi kepastian hukum bagi pemilik produk	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat Halal/HKI		Jumlah sertifikat halal yang diterbitkan dan jumlah merk/HKI yang didaftarkan ke Kemenkumham RI



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
5	Meningkatnya inovasi teknologi industri	Lapangan pekerjaan baru	Orang	Pelatihan pendampingan bagi warga masyarakat	Jumlah warga masyarakat sebelum pelatihan pendampingan dan setelah pelatihan pendampingan		Warga masyarakat yang belum memiliki pekerjaan/perlu peningkatan kompetensi
		Jumlah IKM yang dipromosikan	IKM		Jumlah IKM yang di ikut sertakan dalam pameran		
6	Meningkatnya SDM Industri	Persentase industri kecil yang memiliki SDM berkualitas	%		$\frac{\text{Jml SDM berkualitas}}{\text{Jml SDM dilatih}}$		
7	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Respon dari warga yang mendapatkan pelayanan	



C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Berkembangnya Nilai Ekspor	Nilai ekspor Kota Bandung	Juta US\$	462
2	Meningkatnya pelayanan Metrologi Legal	Tingkat alat UTTP yang di tera/tera ulang	Jenis UTTP	18
3	Meningkatnya inovasi teknologi industri	Lapangan pekerjaan baru	Orang	500



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
Tahun 2018**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Kuning
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Abu-abu



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah 518/Kep.56/DISDAGIN/II/2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai ekspor Kota Bandung	Juta US\$	462	465	100.65
2	Tingkat alat UTTP yang di tera/tera ulang	Jenis UTTP	18	18	100.00
3	Lapangan pekerjaan baru	Orang	500	500	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Nilai ekspor Kota Bandung, dengan realisasi sebesar US\$ 465 juta dari target sebesar US\$ 462 juta atau dengan capaian kinerja 100.65 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Tingkat alat UTTP yang di tera/tera ulang dengan realisasi sebanyak 18 jenis UTTP dari target sebanyak 18 jenis UTTP dan indikator Lapangan pekerjaan baru dengan realisasi sebanyak 500 orang dari target sebanyak 500 orang atau dengan capaian kinerja 100 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 7 sasaran.

Tahun 2018 adalah Tahun ke 5 pelaksanaan Revisi Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dari sebanyak 7 sasaran strategis dengan sebanyak 9 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai ekspor Kota Bandung	Juta US\$	462	465	100.65
2	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	%	15	13.74	108.40
3	Meningkatnya kualitas SDM pelaku perdagangan dalam negeri	Pelaku usaha	300	300	100.00
4	Tingkat alat UTTP yang di tera/tera ulang	Jenis UTTP	18	18	100.00
5	Jumlah Produk industri yang memiliki Sertifikat	IKM	400	410	102.50
6	Lapangan pekerjaan baru	Orang	500	500	100.00
7	Jumlah IKM yang dipromosikan	IKM	200	219	109.50
8	Persentase industri kecil yang memiliki SDM berkualitas	%	97.83	97.83	100.00
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81	81.05	100.06

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	55.56 %
2	Sesuai Target	44.44 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Dari sebanyak 7 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	4	2	50.00	2	50.00	0	0.00
2	Misi 2	4	2	50.00	2	50.00	0	0.00
3	Misi 3	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	9	5	55.56	4	44.44	0	0.00

Dari sebanyak 7 sasaran dengan sebanyak 9 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	4	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	50.00 %
2	Sesuai Target	2	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	4	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	50.00 %
2	Sesuai Target	2	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
C.	Misi 3	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 7 sasaran dan sebanyak 9 indikator kinerja dari sebanyak 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Revisi Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tahun 2014-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Berkembangnya Nilai Ekspor

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Berkembangnya Nilai Ekspor

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Nilai ekspor Kota Bandung	Juta US\$	-		0.00	-		0.00	-		0.00	457	465	101.75	462	465	100.65

Sasaran Berkembangnya Nilai Ekspor dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai ekspor Kota Bandung" adalah sebesar 465 dari target sebesar 462 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.65 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai ekspor Kota Bandung" tahun ini menurun 1.10 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 101.75. Kinerja nilai ekspor Kota Bandung tahun 2018 (US\$ 465) menurun 25 % jika dibandingkan dengan target ekspor tahun 2018 di RPJMD yang mencapai



US\$ 614 dengan produk yang turun adalah Pakaian jadi, Alat masak, dan karpet dengan negara tujuan Amerika dan Asia.

Faktor penyebabnya baik berasal dari eksternal maupun internal. Faktor eksternal antara lain lesunya perekonomian global dan jatuhnya harga komoditas. Lesunya perekonomian global menyebabkan transaksi perdagangan dunia menurun. dikarenakan permintaan dari buyer berkurang dan bersaing harga dengan Vietnam dan Thailand, Bahan baku impor masih dikenakan pajak yang tinggi. Adapun faktor internal antara lain kurangnya daya saing produk ekspor dan penurunan produksi sejumlah komoditas. Lemahnya daya saing terutama produk olahan nonmigas membuat banyak pasar ekspor Indonesia direbut negara lain seperti Filipina dan Vietnam. Sehingga tanpa adanya perbaikan daya saing yang signifikan, peningkatan produksi yang berkualitas, perbaikan iklim usaha di dalam negeri, dan regulasi yang memadai terbatas bisa jadi tren negatif akan terus berlanjut dan produk Kota Bandung sulit memasuki pasar Eropa, Asia dan Australia.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Nilai ekspor Kota Bandung" tahun ini adalah sebesar 100.65 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian maka capaian kinerjanya mencapai 100.65 %.

Sasaran Berkembangnya Nilai Ekspor dengan indikator Nilai Ekspor Kota Bandung didukung oleh program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan alokasi anggaran pada Tahun 2018 sebesar Rp. 1.034.665.300,00 yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kerjasama Standarisasi Mutu Produk Baik Nasional, Bilateral, Regional dan Internasional;
2. Kegiatan kerjasama dengan pemerintah daerah dengan pihak dalam dan luar negeri;
3. Kegiatan membangun jaringan dengan eksportir;
4. Kegiatan pengembangan klaster produk ekspor.



Dalam pelaksanaan pencapaian sasaran berkembangnya nilai ekspor di dukung oleh beberapa faktor pendukung, yaitu :

- Tingginya kreatifitas para pelaku IKM dalam berinovasi;
- Keragaman produk;
- Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata;
- Diberlakukannya Pasar Bebas Asia Pasific 2020.

Sedangkan beberapa faktor penghambat yang masih terlihat dan sangat dirasakan oleh para pelaku IKM/UKM dalam menjangkau akses pasar luar negeri, yaitu :

- Penurunan permintaan dari buyer dikarenakan persaingan harga dengan Negara lain;
- Bahan baku impor dengan pajak yang tinggi;
- Persaingan permintaan produk yang sulit dibuat oleh beberapa pengusaha Kota Bandung sehingga beralih ke Negara lain;
- Permintaan dari luar negeri selalu terbatas oleh kapasitas produksi karena permodalan, bahan baku dan pengetahuan tentang teknologi masih terbatas;
- Produk IKM/UKM masih terbatas dalam hal kualitas bahan baku terutama untuk makanan yang akan memasuki pasar Eropa, Asia dan Australia.

Sasaran 2

Terwujudnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Terwujudnya tertib usaha perdagangan dan
stabilitas harga barang kebutuhan pokok

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	%	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	15	0.27	198.20	15	13.74	108.40
2	Meningkatnya kualitas SDM pelaku perdagangan dalam negeri	Pelaku usaha	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	300	385	128.33	300	300	100.00

Sasaran Terwujudnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok" adalah sebesar 13.74 dari target sebesar 15 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 108.40 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tingkat lonjakan harga dihitung berdasarkan angka kenaikan/penurunan harga rata-rata pada 9 jenis komoditi (sesuai dengan Perpres No. 71 Tahun 2015) selama kurun waktu 3 bulan (triwulan) dibandingkan dengan angka kenaikan/penurunan harga rata-rata 9 jenis komoditi pada triwulan sebelumnya. Angka kenaikan/ penurunan harga di dapat melalui kegiatan pemantauan harga barang kebutuhan pokok pada hari



Selasa setiap minggu ke lokasi pasar rakyat di Kota Bandung. Adapun dari 9 komoditi terdapat beberapa komoditi mengalami lonjakan harga yang sangat signifikan antara lain cabe rawit, cabe merah, daging ayam dan telur ayam.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok" tahun ini menurun 89.80 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 198.20

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok" tahun ini adalah sebesar 108.40 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian maka capaian kerjanya mencapai 91.60 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Meningkatnya kualitas SDM pelaku perdagangan dalam negeri" adalah sebesar 300 dari target sebesar 300 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Meningkatnya kualitas SDM pelaku perdagangan dalam negeri" tahun ini menurun 28.33 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 128.33

Sasaran Terwujudnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok didukung oleh 2 program yaitu Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 272.153.450,00 yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting serta operasi pasar/pasar murah Kepokmas dan Gas 3 Kg serta program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 997.628.152,00 yang dilaksanakan melalui kegiatan :



1. Kegiatan pembinaan pelaku usaha pedagang formal;
2. Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pedagang pasar rakyat;
3. Kegiatan pengembangan kemitraan dan kerjasama antar lembaga;
4. Kegiatan peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan.

Dalam pelaksanaan pencapaian sasaran Terwujudnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok, sebenarnya tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat dalam rangka meningkatkan daya saing para pelaku usaha perdagangan di Kota Bandung.

Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian sasaran, antara lain :

- Tersedianya payung hukum (Perda/Perwal) terkait pengendalian toko-toko modern;
- Beraneka ragam produk unggulan Kota Bandung;
- Diberlakukannya Pasar Bebas Asia Pasific 2020

Sedangkan beberapa faktor penghambat yang teridentifikasi, antara lain :

- Rendahnya kesadaran hukum para pelaku usaha perdagangan;
- Lemahnya dunia usaha;
- Menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk dalam negeri;
- Berjamurnya toko-toko modern;
- Menurunnya daya saing produk lokal.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 2 "Meningkatnya kualitas SDM pelaku perdagangan dalam negeri" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Sasaran 3

Meningkatnya pelayanan Metrologi Legal

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya pelayanan Metrologi Legal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Tingkat alat UTTP yang di tera/tera ulang	Jenis UTTP	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	10	15	150.00	18	18	100.00

Sasaran Meningkatnya pelayanan Metrologi Legal dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat alat UTTP yang di tera/tera ulang" adalah sebesar 18 dari target sebesar 18 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat alat UTTP yang di tera/tera ulang" tahun ini menurun 50.00 point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 150.00 %.

Sasaran meningkatnya pelayanan Metrologi Legal didukung oleh Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.998.854.080,00 yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah;
2. Kegiatan pengawasan Kemetrolgian Daerah.

Dalam pencapaian Sasaran meningkatnya pelayanan Metrologi Legal, tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat dalam rangka

mewujudkan Kota Bandung sebagai Daerah Tertib Ukur.

Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian sasaran, antara lain :

- Telah terbentuknya UPT Metrologi Legal Kota Bandung;
- Sudah ada regulasi tentang kewajiban untuk tera/tera ulang alat UTTP;

Sedangkan beberapa faktor penghambat yang teridentifikasi, antara lain :

- Kurang optimalnya kegiatan penyuluhan dan pengawasan terkait wajib tera/tera ulang alat UTTP;
- Kurangnya kesadaran dari para pemilik/pengguna alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) untuk melakukan tera/tera ulang alat UTTP;
- Kurangnya pemahaman dan pengetahuan para pemilik/pengguna alat UTTP mengenai kewajiban tera ulang;
- Terbatasnya kuantitas SDM penera yang memiliki kompetensi.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat alat UTTP yang di tera/tera ulang" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Sasaran 4
Meningkatnya mutu produk industri

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya mutu produk industri

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Produk industri yang memiliki Sertifikat	IKM	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	600	600	100.00	400	410	102.50



Sasaran Meningkatnya mutu produk industri dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu Capaian kinerja nyata indikator Jumlah Produk industri yang memiliki Sertifikat adalah sebesar 410 IKM dari target sebesar 400 IKM yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102.50 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator Jumlah Produk industri yang memiliki Sertifikat tahun ini meningkat 2.50 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00, yang dilaksanakan melalui fasilitasi Pendaftaran Sertifikasi Halal sebanyak 350 IKM dan Pendaftaran Merk (Kekayaan Intelektual) sebanyak 60 IKM. Indikator kinerja Jumlah IKM yang memiliki sertifikat produk merupakan bentuk fasilitasi yang diberikan kepada IKM/UKM yang memiliki produk kuliner fashion, craft untuk mendaftarkan Sertifikat Halal ke LPPOM-MUI dan pendaftaran KI/Merk ke Kanwil Kemenkumham Propinsi Jawa Barat.

Sasaran Meningkatnya mutu produk industri didukung oleh Program Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.610.377.080.00 yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standardisasi, pengujian dan kualitas;
2. Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri.

Dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya mutu produk industri, tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat dalam rangka mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Halal.

Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian sasaran, antara lain :

- Adanya kesediaan kerjasama LPPOM-MUI dan Kanwil Kemenkumham Propinsi Jawa Barat dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Bandung;

- Banyaknya IKM Kota Bandung yang bergerak dibidang produksi kuliner, fashion dan craft.

Sedangkan beberapa faktor penghambat yang teridentifikasi, antara lain :

- Kurangnya informasi mengenai fasilitasi Pendaftaran Sertifikat Halal dan Merk (Kekayaan Intelektual);
- Terbatasnya pemahaman pelaku IKM/UKM mengenai persyaratan untuk pengajuan fasilitasi Pendaftaran Sertifikat Halal dan Merk (Kekayaan Intelektual);
- Banyaknya merk dagang/jasa yang mirip dalam penyebutan atau sudah ada yang mendaftarkan sehingga harus terlebih dahulu melakukan penelusuran merk yang akan digunakan;

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Jumlah Produk industri yang memiliki Sertifikat" tahun ini adalah sebesar 102.50 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian maka capaian kinerjanya mencapai 102.50 %.

Sasaran 5

Meningkatnya inovasi teknologi industri

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya inovasi teknologi industri

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Lapangan pekerjaan baru	Orang	-		0.00	-		0.00	-		0.00	350	350	100.00	500	500	100.00
2	Jumlah IKM yang dipromosikan	IKM	-		0.00	-		0.00	-		0.00	200	200	100.00	200	200	100.00



Sasaran Meningkatnya inovasi teknologi industri dilaksanakan melalui 2 indikator yaitu indikator Lapangan pekerjaan baru dan Jumlah IKM yang dipromosikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Lapangan pekerjaan baru" adalah sebesar 500 dari target sebesar 500 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Ketercapaian Tahun 2018 dilaksanakan melalui Program pengembangan industri kecil menengah dengan melaksanakan tahapan kegiatan mulai dari rekrutmen melalui media Radio dan Surat Kabar serta media sosial, yang selanjutnya dilakukan pembekalan bagi calon peserta penciptaan lapangan kerja baru melalui pemberian materi tentang Kewirausahaan, Enterpreneurship, Pemasaran Online/Market Place serta succes story dari pelaku IKM. Dari hasil rekrutmen tersebut, dilanjutkan dengan pelaksanaan diklat dengan jenis diklat berdasarkan hasil rekrutmen yaitu diklat kuliner jasa boga dan pastry, boneka, akrilik, rajut, pembuatan sepatu, sablon, pembuatan tahu dan batik nyere.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Lapangan pekerjaan baru" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Jumlah IKM yang dipromosikan" adalah sebesar 200 IKM dari target sebesar 200 IKM yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan dan dilaksanakan melalui fasilitasi promosi produk dengan mengikutsertakan para pelaku IKM pada event-event pameran baik Tingkat Propinsi maupun Tingkat Kota. Tahun 2018 para pelaku IKM di ikusertakan dalam Pameran Pengembangan Industri Kreatif Kab/Kota, Pameran Bandung GPUKD Expo 2018 dan Pameran Pelangi Nusantara VI.



Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Jumlah IKM yang dipromosikan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

Sasaran Meningkatnya inovasi teknologi industri didukung oleh 2 program yaitu "Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah" dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.066.923.634,00 yang dilaksanakan melalui :

1. Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri;
2. Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri

Dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya inovasi teknologi industri, tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Beberapa faktor pendukung yang dapat mendukung pencapaian sasaran, antara lain :

- Antusiasme para pelaku IKM untuk terus belajar dalam meningkatkan kualitas dan daya saing hasil produknya;
- Adanya niat dari pelaku IKM untuk belajar berinovasi dalam membuat produk baru;

Sedangkan beberapa faktor penghambat yang teridentifikasi, antara lain :

- Terbatasnya akses sumber permodalan bagi para pelaku IKM;
- Sulitnya mendapatkan bahan baku industri yang berkualitas namun terjangkau oleh para pelaku IKM;
- Terbatasnya akses pemasaran dalam memasarkan hasil produk IKM;
- Terbatasnya kemampuan para pelaku IKM dalam melakukan inovasi produk dan desain kemasan yang memiliki daya saing;
- Terbatasnya mesin/peralatan dalam proses produksi
- Lemahnya daya saing sentra industri.

Sasaran 6

Meningkatnya SDM Industri

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran 6
Meningkatnya SDM Industri

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase industri kecil yang memiliki SDM berkualitas	%	-		0.00	-		0.00	-		0.00	89,50	89,50	100.00	97.83	97.83	100.00

Sasaran Meningkatnya SDM Industri dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase industri kecil yang memiliki SDM berkualitas" adalah sebesar 97.83 % dari target sebesar 97.83 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Persentase industri kecil yang memiliki SDM berkualitas sebesar 97.83 % diperoleh dengan formulasi jumlah kumulatif SDM pelaku industri kecil dan menengah (IKM) berkualitas yang telah dibina sebanyak 783 IKM dibagi SDM IKM Kota Bandung yang mengikuti diklat sebanyak 800 IKM. Capaian target indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program peningkatan kemampuan teknologi industri dengan melaksanakan diklat kuliner jasa boga dan pastry, boneka, akrilik, rajut, pembuatan sepatu, sablon, pembuatan tahu dan batik nyere.

Pengukuran persentase industri kecil yang memiliki SDM berkualitas diukur dengan kriteria :

1. Volume usaha meningkat pada 2 tahun terakhir;
2. Telah mengikuti minimal 2 jenis pelatihan; dan
3. Telah membuat laporan keuangan sederhana.



Kriteria tersebut diukur dengan melakukan monitoring dan evaluasi melalui pelaksanaan survey yang dilakukan ke setiap pelaku industri kecil dan menengah yang telah dibina.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase industri kecil yang memiliki SDM berkualitas" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Sasaran Meningkatnya SDM Industri didukung oleh Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.576.705.652,00 yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pelatihan keterampilan industri kerajinan serta Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri.

Dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya SDM Industri, tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Beberapa faktor pendukung yang dapat mendukung pencapaian sasaran, antara lain :

- Mesin proses produksi yang memadai dan mengikuti perkembangan teknologi dalam bidang industri;
- Kemudahan akses permodalan dalam pengembangan usaha;
- Pembinaan secara berkelanjutan kepada para pelaku IKM.

Sedangkan beberapa faktor penghambat yang teridentifikasi, antara lain :

- Masih terbatasnya kompetensi SDM pelaku IKM dalam teknologi mesin proses produksi;
- Masih ada pola pikir dari pelaku IKM, bahwa setelah mengikuti diklat akan mendapatkan bantuan permodalan atau mesin produksi;

Sasaran 7

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pencapaian sasaran 7 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 7
Peningkatan kualitas pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	80	80.53	100.66	81	81.05	100.06

Sasaran Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah sebesar 81.05 (**Baik**) dari nilai target sebesar 81 yang direncanakan pada Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.06 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, mengalami kenaikan sebesar 0.52 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai nilai sebesar 80.53.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 100.06 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian maka capaian kerjanya mencapai 100.06 %.

Pengukuran kepuasan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali melalui metode survey dengan kuesioner terhadap warga masyarakat yang menerima pelayanan, baik pelayanan di Kantor UPT Metrologi Legal serta UPT Balai Industri dan Promosi maupun Unit Pelayanan IPSKA pada Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Adapun indikator dan unit variabel pertanyaan kuesioner dalam survey ini mengacu kepada standar



penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Kepmenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Terdapat 14 (empat belas) unsur yang dinilai dalam survey ini, yang meliputi :

- U.1. Kemudahan prosedur pelayanan;
- U.2. Keseuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan;
- U.3. Kejelasan dan kepastian petugas dalam melayani;
- U.4. Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan;
- U.5. Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan;
- U.6. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan;
- U.7. Kecepatan pelayanan;
- U.8. Keadilan dalam melakukan pelayanan;
- U.9. Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan;
- U.10. Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan;
- U.11. Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- U.12. Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan;
- U.13. Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan;
- U.14. Keamanan di unit pelayanan.

Selanjutnya nilai per unsur dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang di lakukan melalui metode survey dengan kuesioner, di uraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13
Nilai Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
s.d. Triwulan IV Tahun 2018

No. Unsur	Unsur Pelayanan	Nilai Per Unsur	Rata-rata
U.1	Kemudahan prosedur pelayanan	3,09	0,22
U.2	Keseuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	3,18	0,23
U.3	Kejelasan dan kepastian petugas dalam melayani	3,21	0,23
U.4	Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan	3,22	0,23
U.5	Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan	3,24	0,23
U.6	Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan	3,49	0,25
U.7	Kecepatan pelayanan	3,31	0,23
U.8	Keadilan dalam melakukan pelayanan	3,19	0,23
U.9	Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan	3,24	0,23
U.10	Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan	3,19	0,23
U.11	Keseuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan	3,37	0,24
U.12	Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan	3,22	0,23
U.13	Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan	3,44	0,24
U.14	Keamanan di unit pelayanan	3,29	0,23
Nilai Indeks Pelayanan			3.24
Nilai IKM			81.05
Nilai Mutu Pelayanan			B
Kategori Kinerja Pelayanan			Baik

Sumber : Diolah Subag Prodatin Disdagin Kota Bandung, 2018

D. Akuntabilitas Keuangan

Tahun Anggaran 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Sasaran dengan anggaran sebesar Rp. 12.361.329.348,- dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 10.207.200.283,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 82.57 %. Adapun rincian pagu dan realisasi capaian anggaran Sasaran Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Pagu dan Realisasi Capaian Anggaran Sasaran

No.	Sasaran	Program	Pagu	Realisasi	%
1.	Berkembangnya nilai ekspor	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	1.034.665.300	957.819.019	92.57
2.	Terwujudnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	272.153.450	252.784.600	92.88
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	997.628.152	954.514.000	95.68
3.	Meningkatnya pelayanan Metrologi Legal	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	4.998.854.080	3.803.346.529	76.08
4.	Meningkatnya mutu produk industri	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	1.610.377.080	1.578.957.820	98.05
5.	Meningkatnya inovasi teknologi industri	Program pengembangan industri kecil menengah	870.945.634	818.043.200	93.93
6.	Meningkatnya SDM Industri	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	2.576.705.652	1.841.735.115	71.48
7.	Peningkatan kualitas pelayanan publik				
Jumlah			12.361.329.348	10.207.200.283	82.57



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung menetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.65 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 104.20 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 102.50 %
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 104.75 %
- Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.06 %



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 7 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 12.719.413.307 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.207.200.283, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.512.213.024

Revisi Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung 2014-2018 menetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.65 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 104.20 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 102.50 %
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 104.75 %
- Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.06 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 12.719.413.307 (dua belas milyar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah 80.25 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut



menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.